Definisi Perseroan Terbuka atau Publik Menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia

The Definition of Public Listed Company according to Indonesian Law

Suwinto Johan*

Program Studi Manajemen, Fakultas Bisnis, President University, Indonesia

*Corresponding Email: suwintojohan@gmail.com

Abstrak

Dalam masyarakat, kita sering mendengarkan perusahaan terbuka. Perusahaan terbuka seakan-akan menjadi dua suku kata memperoleh penghargaan untuk sebuah perusahaan dalam memperoleh kepercayaan. Banyak masyarakat menginginkan usahanya menjadi perusahaan terbuka. Perusahaan terbuka akan dengan mudah memperoleh dana dari umum. Perusahaan terbuka menurut masyarakat adalah perusahaan yang menawarkan sahamnya di bursa efek. Definisi ini berbeda dengan definisi pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU PM). Perbedaan definisi mengakibatkan timbulnya kebingungan di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis definisi Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas Terbuka berdasarkan UU PT dan UU PM. Penelitian ini mempergunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), perseroan terbuka adalah perseroan yang melakukan penawaran umum, sedangkan berdasarkan UU PM, perusahaan publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Definisi penawaran umum terdapat pada UU PM, yakni kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UU PM dan peraturan pelaksanaannya. Dengan adanya Undang-undang Cipta Kerja telah dilakukan sinkronisasi definisi perseroan terbuka dan perseroan publik di UU PM dan UU PT.

Kata Kunci: Definisi; Perusahaan Terbuka; Pasar Modal

Abstract

In society, we often listen to public listed companies. Public listed company seems to be two syllables to get a reward for a company in gaining trust. Many people want their business to be a public listed company. Public companies will easily obtain funds from the public. A public company according to the public is a company that offers its shares and listed in stock exchange. This definition is different from the definition in Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market (UU PM). Due to the difference definition, it creates confusion in society. This study aims to analyze the definition of Limited Liability Company, Public Limited Liability Company based on the Limited Liability Company Law and the Capital Market Law. This study uses a normative juridical method. This study concludes that based on Law Number 40 of 2007 (UU PT) concerning Limited Liability Companies, a public company is a company that makes a public offering, whereas based on the UU PM, a public company is a company whose shares have been owned by at least 300 (three hundred) shareholders and has a paid-up capital of at least IDR 3,000,000,000.00 (three billion rupiah) or an amount of shareholders and paid-up capital as stipulated by a Government Regulation. The definition of a public offering is contained in the UU PM, which is securities offering activity carried out by an issuer to sell Securities to the public based on the procedures stipulated in the PM Law and its implementing regulations. With the existence of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, it has synchronized the definition of a public company and a public company in the PM Law and the PT Law.

Keywords: Definition; Public Listed Company; Capital Market

How to Cite: Johan, S. (2020). Definisi Perseroan Terbuka atau Publik Menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia. *Jurnal Mercatoria*. 14 (1): 38-45.

PENDAHULUAN

Banyak masyarakat umum percaya bahwa menjadi perusahaan terbuka merupakan cerminan kepercayaan masyarakat. Persepsi masyarakat ini telah tertanam sejak adanya bursa efek di Indonesia. Investor yang ingin melakukan investasi pada sebuah negara juga akan mencari rekanan perusahaan yang telah terdaftar di bursa efek. Keterbukaan informasi di dalam UU PM telah memberikan jaminan tambahan pada perusahaan terbuka. Pengawasan oleh regulator seperti OJK dan bursa efek telah memberikan nilai tambah pada perusahaan terbuka.

Pemilik perusahaan membawa perusahaan menjadi perusahaan terbuka bertujuan untuk lebih mudah dalam akses terhadap sumber pendanaan baik pendanaan saham maupun pendanaan utang. Pendanaan dari masyarakat melalui saham berbeda dengan pendanaan masyarakat melalui surat utang. Hal lainnya, adalah meningkatkan reputasi perusahaan dengan menjadi perusahaan terbuka. Salah satu tujuan dari perusahaan terbuka adalah untuk menyejahterakan para pemilik saham melalui pembagian keuntungan perusahaan atas deviden (Inayah & Wijayanto, 2020).

Perusahaan terbuka juga memiliki kewajiban yang ketat dalam hal pelaporan aktivitas perusahaan. Pelaporan ini disampaikan secara rutin maupun tidak rutin sebagaimana diatur dalam UU PM.

Masyarakat mengerti bahwa perusahaan terbuka hanya sebagai perusahaan yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal. Masyarakat tidak mengetahui bahwa perusahaan terbuka dimiliki oleh masyarakat dengan porsi yang sangat kecil dan ada juga perusahaan terbuka yang dimiliki oleh masyarakat dengan porsi saham yang signifikan. Definisi perusahaan terbuka, perusahaan publik dan perseroan

terbatas yang *go public* telah berkembang dengan berbagai definisi. Tidak adanya sebuah definisi yang jelas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini. Pengertian *go public* atau perusahaan terbuka adalah peristiwa penawaran saham yang dilakukan oleh perusahaan (emiten) kepada masyarakat umum (*investor*) untuk pertama kalinya. Hal ini berarti perusahaan tersebut sudah memberikan informasi perusahaannya kepada masyarakat maupun *investor* dengan mudah dan terbuka, karena perusahaan yang sudah *go public* di belakang nama perusahaan ditambahkan istilah "Tbk" (terbuka) (Hartono & Djawoto, 2018). Definisi ini lebih fokus pada definisi *go public* atau *initial public offering* (IPO) yakni perusahaan yang menawarkan sahamnya untuk pertama kali kepada masyarakat umum.

Perseroan Terbuka (Tbk.) yaitu perseroan terbatas yang *go public* yang sahamnya dijual lewat pasar modal (Ginting dalam Nurnaningsih & Solihin, 2020). Definisi perusahaan terbuka di sini, merupakan definisi umum. Perusahaan *go public* atau perusahaan terbuka adalah perusahaan yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh masyarakat atau publik (Margaretha & Suhartono, 2016).

Perusahaan terbuka adalah perusahaan publik, yaitu perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal yang disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,00 atau suatu jumlah pemegang saham dan modal yang disetor dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (Irawan & Manurung, 2020; Permatasari, 2014).

Emiten atau perusahaan terbuka adalah institusi atau perusahaan yang telah menerbitkan efek di pasar modal. Setiap perusahaan yang telah menerbitkan efek di pasar modal akan diberi nama Tbk.

(terbuka) di belakang nama perusahaannya (Na'afi, 2020). Perusahaan terbuka adalah perusahaan yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh masyarakat. Penjualan saham ke masyarakat dilakukan dengan cara *initial public offering* (IPO) (Vedy et al., 2016).

Sedangkan *go public* atau perusahaan terbuka adalah peristiwa penawaran saham yang dilakukan oleh perusahaan (emiten) kepada masyarakat umum (*investor*) untuk pertama kalinya (Marsandy et al., 2019). *Go public* (perusahaan terbuka) adalah perusahaan atau emiten melakukan penawaran saham kepada masyarakat umum atau *investor* untuk pertama kalinya (Sumariyah dalam Fittriana et al., 2020). *Go public* artinya perusahaan telah memutuskan untuk menjual sahamnya kepada masyarakat umum dan siap untuk dinilai oleh publik secara langsung (Fahmi dalam Fittriana et al., 2020). Perusahaan *public* adalah proses perusahaan yang menjadi perusahaan terbuka tanpa lewat proses penawaran umum (Rosmida & Wahyuni, 2017).

Salah satu tujuan dari perusahaan terbuka adalah untuk menyejahterakan para pemilik saham melalui pembagian keuntungan perusahaan melalui deviden. (Inayah & Wijayanto, 2020). Keuntungan pemilik saham juga diperoleh dari kenaikan harga saham perusahaan. Sehingga total kesejahteraan pemilik saham adalah deviden dan kenaikan harga saham perusahaan terbuka.

Penelitian ini bertujuan untuk mendefinisikan perusahaan terbuka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Tujuan definisi yang sama adalah agar masyarakat akademisi maupun praktisi memiliki pengertian yang sama dalam menyebut istilah perusahaan terbuka.

Berdasarkan latar belakang dan perbedaan definisi perusahaan terbuka yang ada, maka peneliti ingin meneliti

pengertian perusahaan terbuka antara masyarakat umum dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memiliki pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1) Bagaimana ragam definisi perusahaan terbuka menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia? 2) Implikasi keragaman pendefinisian perusahaan terbuka?

Dengan adanya persamaan definisi, maka masyarakat praktisi dan akademisi akan memiliki persamaan dalam mengerti perusahaan terbuka. Definisi yang sama ini akan mempermudah *regulator* dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder (Johan & Ariawan, 2021a). Penelitian ini juga mempelajari definisi perusahaan terbuka menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan bahan atau data yang diperoleh langsung dari lapangan sebagai sumber langsung. Sedangkan bahan sekunder merupakan bahan kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier (Lie et al., 2019; Johan & Ariawan, 2021b).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ragam Definisi Perusahaan Terbuka Menurut Peraturan-perundang-undangan di Indonesia

Definisi pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan

dengan efek. Penjelasan definisi ini dijelaskan pada tabel 1 dan tabel 2.

Tabel 1 Definisi Perusahaan Publik Menurut UU PM

	Perusahaan Publik	Emiten
Efek	Saham	Saham / Surat Utang dan lainnya
Pemegang/Investor	Minimal 300 Orang	Tidak diatur
Jumlah Minimal	Modal Rp. 3 Milliar	Tidak diatur
Terdaftar di Pasar Modal	Tidak Wajib	Terdaftar
Penawaran Umum	Tidak	Dilakukan
Pernyataan Pendaftaran	Wajib	Wajib
Pelaporan	Wajib	Wajib

Sumber: Hasil Penelitian

Pada pasar modal terdapat emiten-emitan. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum. Dimana berdasarkan definisi di UU PM, penawaran umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya. Sehingga emiten adalah pihak yang melakukan penawaran efek kepada masyarakat.

Sedangkan efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Efek tidak hanya terdiri dari saham, tetapi surat berharga lainnya seperti obligasi, surat pengakuan utang seperti *medium term notes* atau kontrak berjangka atas efek. Emiten tidak hanya melakukan penawaran saham tetapi juga surat utang.

Berdasarkan UU PM, perusahaan publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, sehingga perusahaan publik adalah perusahaan yang dimiliki oleh minimal 300 pemegang saham dan minimal Rp. 3 miliar.

Oleh karena itu, definisi perusahaan publik berbeda dengan perusahaan yang mencatat efek di pasar modal atau disebut emiten. Akan tetapi, pernyataan pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal (selanjutnya disebut Bapepam) atau Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) oleh emiten dalam rangka penawaran umum atau perusahaan publik. Setiap perusahaan publik wajib menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam.

Perusahaan Terbuka menurut Masyarakat Umum dan UU PT

Berdasarkan UU PT, Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Perseroan terbatas terbuka adalah perusahaan yang menawarkan penawaran umum saham. Penawaran umum diartikan sebagai penawaran saham ke masyarakat umum. Perseroan publik adalah perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Dalam hal perseroan terbuka selain berlaku ketentuan tersebut, pada akhir nama Perseroan ditambah kata singkatan "Tbk". Penambahan Tbk pada perubahan

anggaran dasar mengenai status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka mulai berlaku sejak tanggal dimana efektif pernyataan pendaftaran yang diajukan kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal bagi perseroan publik; atau dilaksanakan penawaran umum, bagi perseroan yang mengajukan pernyataan pendaftaran kepada lembaga pengawas di

bidang pasar modal untuk melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Maka, perusahaan yang telah menjadi status terbuka harus dicantumkan Tbk di belakang nama perseroan. Identitas Tbk menunjukkan status perusahaan yang telah menawarkan sahamnya kepada masyarakat umum.

Tabel 2 Definisi Perseroan Publik Menurut UU PT

	Perseroan Publik	Perseroan Terbuka
Efek	Saham	Penawawaran Umum Saham
Pemegang Saham	Sesuai Dengan UU PM	Tidak disebutkan
Modal Disetor	Sesuai Dengan UU PM	Tidak disebutkan
Di bidang	Sesuai Dengan UU PM	Pasar Modal

Sumber: Hasil Penelitian

UU PT juga menegaskan bahwa bagi Perseroan Terbuka berlaku ketentuan UU PT jika tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Dengan demikian, maka hal yang belum diatur dalam UU PT, maka akan merujuk pada UU PM.

Masyarakat mengenal perusahaan terbuka sebagai perusahaan yang menawarkan sahamnya kepada masyarakat umum. Masyarakat tidak mengenal berapa persen atau berapa jumlah minimum pemegang saham. Masyarakat *investor* hanya fokus pada kinerja perusahaan terbuka atau prospek perusahaan terbuka. Banyak masyarakat *investor* perorangan hanya mengikuti pergerakan harga saham yang tercatat di bursa, tanpa mengetahui jumlah saham yang ditawarkan.

Jumlah saham yang ditawarkan akan memengaruhi jumlah transaksi saham. Jumlah saham yang ditawarkan makin besar, maka likuiditas saham akan semakin tinggi. Semakin banyak saham yang tersedia untuk diperjualbelikan, semakin banyak *investor*, sehingga semakin banyak transaksi yang akan terjadi.

Berdasarkan Pasal 109 UU Cipta Kerja didefinisikan bahwa perseroan terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Perseroan publik adalah perseroan yang melakukan penawaran saham kepada masyarakat umum. Definisi ini hampir sama dengan definisi perusahaan terbuka pada UU PT.

Perseroan publik adalah perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Definisi perseroan publik ini memiliki kesamaan definisi dengan perusahaan publik berdasarkan UU PM. Berdasarkan UU PM, perusahaan publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Tabel 3 Definisi Perseroan Terbuka dan Publik UU CK

	Perseroan Terbuka	Perseroan Publik
Perseroan	Publik	Perseroan
Efek	Penawaran Umum Saham	Saham
Jumlah Pemegang Saham	Tidak disebutkan	Diatur sesuai peraturan perundang-undangan
Modal Disetor	Tidak disebutkan	Diatur sesuai peraturan perundang-undangan

Sumber: Hasil Penelitian

UU PM menegaskan bahwa perusahaan publik adalah perseroan yang dimiliki sekurang-kurangnya 300 orang dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp.3.000.000.000,00. Jika ada perusahaan yang membagikan sahamnya kepada karyawannya dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) maka telah dikategorikan sebagai perusahaan publik.

Perusahaan publik wajib menyerahkan pernyataan pendaftaran kepada OJK. Perusahaan publik wajib memenuhi semua kewajiban pada OJK. Perusahaan publik wajib menyerahkan laporan-laporan kepada OJK.

UU PT hanya mengatur mengenai perusahaan terbuka adalah perseroan publik yang melakukan penawaran umum saham. Perusahaan publik, jika kita merujuk pada definisi UU PM, maka perusahaan terbuka adalah perseroan yang dimiliki sekurang-kurangnya 300 orang dan

memiliki modal disetor sekurangnya Rp. 3.000.000.000,00, yang melakukan penawaran umum saham. Definisi perseroan terbuka sesuai dengan UU Cipta Kerja dijelaskan pada tabel 3.

Jika ada perseroan yang melakukan penawaran umum tidak memenuhi 300 orang pemegang saham dan modal disetor di bawah Rp. 3.000.000.000,00 maka perseroan tersebut tidak dikategorikan sebagai perusahaan terbuka. Jumlah pemegang saham 300 orang ini mempengaruhi juga pada transaksi harian, dimana jika di tengah periode transaksi, ada investor yang melakukan pengumpulan saham, maka perusahaan memiliki risiko tidak menjadi perusahaan terbuka.

Perbandingan definisi perseroan menurut masing-masing undang-undang digambarkan pada tabel 4. Tiga undang-undang dipaparkan adalah UU PM, UU PT dan UU Cipta Kerja.

Tabel 4 Definisi Perusahaan Terbuka Menurut Undang Undang

	Undang Undang Pasar Modal	Undang Undang Perseroan Terbatas	Undang Undang Cipta Kerja
Definisi	Perusahaan publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.	Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.	Perseroan terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal

Sumber: Hasil Penelitian

Implikasi Keragaman Pendefinisian Perusahaan Terbuka

Definisi yang berbeda antara satu peraturan dengan peraturan lainnya dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaku usaha dan *regulator*. Dengan demikian, perbedaan ini akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Pelaku usaha akan sulit membedakan definisi yang satu dengan lainnya.

Berdasarkan pengertian umum, perusahaan terbuka adalah perusahaan yang mencatat sahamnya di pasar modal atau perusahaan yang sahamnya diperjualbelikan di pasar modal. Pengertian ini telah menjadi pengertian yang umum di masyarakat. Sosialisasi ulang terhadap definisi berdasarkan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan.

Regulator perlu menetapkan definisi yang tunggal untuk perusahaan terbuka atau publik. Definisi tunggal ini akan mempermudah *regulator* dalam mengawasi perusahaan terbuka atau publik. Penetapan persyaratan dalam pengawasan juga akan menjadi lebih mudah.

SIMPULAN

Menurut UU PM, perusahaan publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Berdasarkan UU PT, perseroan terbuka adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Perusahaan terbuka adalah perusahaan yang menawarkan sahamnya kepada masyarakat umum dan tercatat pada

bursa efek. Maka, disimpulkan bahwa perusahaan terbuka adalah perusahaan yang melakukan penawaran umum saham sesuai dengan peraturan yang ada atau yang telah memiliki sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Dengan adanya UU Cipta Kerja, maka definisi di UU PM dan UU PT telah menjadi jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahmi dalam Fitriana, R. N. Mardani, R. M. & Wahono, B. (2020). Analisis Perbandingan Kinerja Perusahaan Sebelum Dan Sesudah Go Public. *E-Journal Riset Manajemen Prodi Manajemen*. 9(10): 32-41.
- Ginting dalam Nurnaningsih, R. & Solihin, D. (2020). Kedudukan Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Bentuk Badan Hukum Perseroan Modal Ditinjau Menurut Undang Undang PT dan Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW), *Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. 1(20): 55-64.
- Hartono, P. N. H. & Djawoto (2018). Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum Dan Sesudah Go Public Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen*. 7 (3): 1-16
- Inayah, N. H. & Wijayanto, A. (2020). Pengaruh Struktur Modal, Kepemilikan Manajerial, dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*. 9 (3): 242-250
- Irawan, F. & Manurung, N. Y. (2020). Analisis Economic Value Added (EVA) dan Market Value Added (MVA) Sebagai Alat Ukur Kinerja Keuangan PT. Garuda Indonesia Tbk Tahun 2017-2019. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*. II (1): 31-45.
- Johan, S., & Ariawan. (2021a). Consumer Protection In Financial Institutions. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 29(2): 173-183.
- Johan, S. & Ariawan. (2021b). Keterbukaan Informasi UU Pasar Modal Menciptakan Asymmetric Information dan Semi Strong Form. *Masalah Masalah Hukum*, 50(1): 106-118.
- Lie, G. Saly, J. N. Gunadi, A. & Tirayo, A. M. (2019). Problematika UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU Terhadap Bank Sebagai Kreditor Separatis, *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 2 (2), ISSN 2620-7710, ISSN 2621-0398.

- Margaretha, C. & Suhartono, S. (2016). Kemampuan Ukuran Perusahaan Memoderasi Determinan Audit Delay. *Auditing*. 5(2): 185-204
- Marsandy, C., Deviyanti, D. R., & Setiawati, L. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum dan Sesudah Go Public pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, 3(4): 1-14.
- Na'afi (2020). Efektifitas Kebijakan OJK Terkait Buyback Saham Terhadap Perubahan IHSG di Masa Pandemi Covid-19. *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*. 2(2): 629-644.
- Permatasari, P. (2014). Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Perusahaan Terbuka Akibat Putusan Pailit. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1547>
- Rosmida, & Wahyuni, E. S. (2017). Keberhasilan Program Yuk Nabung Saham Oleh Bursa Efek Indonesia Dalam Meningkatkan Penjualan Instrumen Pasar Modal di Indonesia. *Inovbiz*, 5(2): 151-157.
- Sunariyah dalam Fitriana, R. N. Mardani, R. M. & Wahono, B. (2020). Analisis Perbandingan Kinerja Perusahaan Sebelum Dan Sesudah Go Public. *E-Journal Riset Manajemen Prodi Manajemen*. 9 (10): 32-41.
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- Vedy, D., Susi. & Dewangkoro, B. (2016). Pengaruh Kebijakan Dividen Sebagai Variabel Pemoderasi Dari Hubungan Kinerja Keuangan Dan Kinerja Pasar Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (2011-2015). *Jurnal Magister Akuntansi Trisaksi (e-Journal)*. 3(2): 195-226.